



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) BPMPPT Kota Jambi Tahun 2017 mempunyai arti strategis yang memuat Evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.

Kami Menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami Mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi tahun 2017 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi yang akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Visi Misi Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dengan Terwujudnya Pelayanan penanaman Modal dan Perizinan yang profesional dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna mendukung Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Jambi, Maret 2016

An.Plt. Kepala BPMPPT Kota Jambi

Sekretaris


MUHTAR. SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
	3.1 Visi dan Misi	13
	3.2 Tujuan Renja SKPD	14
	3.3 Sasaran Renja SKPD	15
	3.4 Program dan Kegiatan	16
	3.5 Indikator Kinerja	18
	3.6 Pendanaan	19
BAB IV	PENUTUP	21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa tuntutan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) adalah mutlak di wujudkan. Hanya dengan diselenggarakannya tata Pemerintahan yang baik akan didapat satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang membuat penyelenggaraan pemerintahan dapat di pertanggungjawabkan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan organisasi karena perencanaan mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis terhadap tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain itu perencanaan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dari langkah langkah atau kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu perencanaan harus di susun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan situasi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang akan datang.

Dalam Kehidupan organisasi bernegara kita perencanaan menjadi salah satu kewajiban Nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi Publik/Pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tetrera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional. Dalam Undang – undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Pada tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), yaitu dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang penyusunannya berpedoman pada RENSTRA SKPD dan RPJM Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum BPMPPT Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 16).
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 37).



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja ini adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis BPMPPT Kota Jambi tahun 2013-2018.
2. Merumuskan Program – Program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
4. Menciptakan Efektivitas dan Efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan Pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi tahun 2017 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun kedepan.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) tahun 2017 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja BPMPPT Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis BPMPPT Kota Jambi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas Merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja BPMPPT Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPMPPT Kota Jambi selama tahun 2017.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan keluaran dan hasil.

Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, buku dan sebagainya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015

a. Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Perjalanan Dinas
12. Penyediaan jasa pengman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam



b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional
2. Pengadaan Mebeler
3. Pengadaan peralatan perkantoran
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
8. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan Rencana SKPD

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penerbitan, Identifikasi dokumen perizinan
2. Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan
3. Monitoring, evaluasi dan pembinaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan
4. Pengelola data dan penataan arsip perizinan



g. Program Pengembangan data/informasi

1. Pengembangan data/informasi

h. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1. Pengembangan potensi Unggulan Daerah
2. Sosialisasi Penanaman Modal
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kegiatan **Belanja Langsung** capaian realisasi keuangan **86,44 %** atau sebesar **Rp. 3.388,965.000,-** dengan 09 program dan 35 kegiatan, sedangkan **Belanja Tidak Langsung** capaian realisasi **93,69 %** atau sebesar **Rp. 2.340.463.156,-** dengan **Total Pagu Dana Tahun 2015** yang terlaksana sebesar **Rp. 5.122.128.254** atau **89,40 %** dari anggaran Rp. **5.729.428.156,-**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2015

Kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi investor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki tolak ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum.

Kesemuannya indikator ini dapat dicapai dengan adanya dukungan sumber daya SKPD yang dimiliki oleh BPMPPT seperti :

- 1) Sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang Handal.
- 2) Tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi (IT),
- 3) Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh perseorangan atau badan usaha,
- 4) Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan dan,
- 5) Tersedianya Sistem Pelayanan dan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Era globalisasi mengajak semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya dalam menghadapi perekonomian global, dirasa perlu menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dengan maksud menciptakan iklim pemasaran modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut maka penyelesaian tugas pokok dan fungsi BPMPPT Kota Jambi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09) adalah untuk membangun perekonomian masyarakat dibidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan salah satu misi RPJM Kota Jambi.

Berdasarkan kondisi yang ada pada tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi telah melakukan kajian akademis terbaik terhadap data peluang dan potensi Investasi kota Jambi, hanya saja data tersebut perlu dilakukan kajian lebih detail terkait dukungan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki Kota Jambi dengan lebih lengkap dan informasi yang di terima calon investor diharapkan akan mendorong minat investor untuk berinvestasi di Kota Jambi.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi dan Misi

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENDUKUNG KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”

Visi tersebut diimplementasikan ke dalam misi-misi pembangunan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas SDM guna menciptakan aparatur yang profesional.**
- 2. Melakukan kajian Peluang dan Potensi Penanaman Modal.**
- 3. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal.**
- 4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan .**
- 5. Meningkatkan system informasi pelayanan perizinan .**
- 6. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal;**
- 7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.**

3.2 Tujuan

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
2. Dengan adanya kajian peluang dan potensi Badan penanaman modal diharapkan dapat memberikan usulan rumusan kebijakan penanaman modal kepada Walikota sehingga kebijakan yang diterapkan memberikan multiplayer effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
3. Dengan adanya promosi peluang dan potensi penanaman modal, diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor yang ada di dalam dan luar negeri tentang Kota Jambi sebagai salah satu daerah tujuan potensial untuk berinvestasi.
4. Dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi investor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Dengan meningkatnya system informasi pelayanan perizinan penanaman modal, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal.



6. Terciptanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
7. Dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sesuai peraturan yang berlaku.

3.3 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan Pelayanan melalui bintek , magang dan sosialisasi.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal secara berkala.
3. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak akademisi guna memperoleh kajian yang mendalam tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi.
4. Merumuskan usulan kebijakan penanaman modal.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset milik Pemerintah Kota Jambi.
6. Menanamkan image kepada investor dalam dan luar negeri bahwa Kota Jambi merupakan salah satu tujuan investasi di Provinsi Jambi.
7. Terciptanya kepercayaan publik terhadap integritas BPMPPT Kota Jambi.
8. Terciptanya etos kerja yang tinggi pada aparatur di BPMPPT Kota Jambi.
9. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik.
10. Implementasi system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara

elektronik (SPIPISE) di Kota Jambi.

11. Terwujudnya kegiatan penanaman modal yang memberikan multiplayer effect positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
12. Mengurangi miskomunikasi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal.
13. Tersedianya data-data terkait penanaman modal dan perizinan di Kota Jambi.
14. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi.

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi, Program dan kegiatan tahun 2015 dikelompokkan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Perjalanan Dinas
12. Penyediaan jasa pengman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional
2. Pengadaan Mebeler
3. Pengadaan peralatan perkantoran
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
8. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

E. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan rencana SKPD

F. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penertiban identifikasi dokumen perizinan
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perizinan

4. Pengelolaan data dan penataan arsip perizinan

G. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2. Sosialisasi penanaman modal
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Pengelolaan sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)

3.5 Indikator Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peningkatan Produktivitas UMKM, IKM dan Aktifitas Perekonomian	Tersedianya informasi peluang Usaha sektor/bidang unggulan.	1 bidang & 2 Kegiatan
		Terlaksana dan terpromosi Potensi Investasi beberapa Komoditi Unggulan Kota Jambi	
		Terselenggaranya pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Penanaman modal di Kota Jambi	50%

		Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal (RKPPMD) Kota Jambi	1 Kegiatan
		Terwujudnya sistem Pelayanan Perizinan penanaman modal yang berbasis IT	50%
		Terlaksananya Monitoring Perizinan	2 Jenis Usaha
		Terlaksananya dan Terfasilitasi Pengaduan	90%



		Terlaksananya Kinerja BPMPPT denga Angka IKM	71%
2	Tercapainya Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik	Terbangunnya sistem informasi Pelayanan perizinan dan Penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh Publik (menuju pelayanan secara on line)	100%
		Tersedianya Data Base Perizinan	100%
		Tertatanya Arsip Perizinan	85%
		Tercapainya Pelayanan Perizinan yang Prima	80%
		Tersedianya data Verifikasi dan identifikasi Perizinan	100%
		Tersedianya Blanko semua jenis Perizinan	100%

3.6 Pendanaan

Untuk membiayai berbagai Program dan Kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan anggaran sebesar : Rp. 3.388.965.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus delapan Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*). Adapun dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari dana alokasi umum BPMPPT Kota Jambi. Dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan, anggaran BPMPPT lebih tinggi 10% dari Renja Tahun 2016. Kondisi tersebut memperhitungkan faktor kondisi dan situasi yang mungkin terjadi pada tahun yang akan datang. BPMPPT Kota Jambi akan bersikap realistis jika memang anggaran pemerintah belum bisa mengakomodir semua anggaran yang ditetapkan dalam Renja BPMPPT Kota Jambi, namun demikian BPMPPT Kota Jambi tetap berharap alokasi anggaran sebesar 1% dari APBD sebagaimana digariskan dalam



kebijakan pemerintah pusat yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang dapat direalisasikan dimasa mendatang.



BAB IV

PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja BPMPPT Kota Jambi Tahun 2017. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun ke depan sehingga visi dan misi BPMPPT tetap dapat diwujudkan dan eksistensi BPMPPT Kota Jambi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja.

Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja BPMPPT Kota Jambi Tahun 2016 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan BPMPPT Kota Jambi sehingga visi **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA Mendukung Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa”** dapat diwujudkan dengan baik.

**RENCANA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
TAHUN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		SUMBER DANA		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KNERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.429.896.425			1.572.886.068				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Teragendanya dan terkirimnya surat menyurat secara baik	Terlaksananya administrasi dan pengirim surat menyurat	BPMPPT KOTA JAMBI	12 bulan	14.460.600		1 tahun	15.906.660	APBD KOTA		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya kesediaan sumber daya listrik, air dan internet di kantor BPMPPT	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet di kantor BPMPPT	BPMPPT KOTA JAMBI	12 bulan	281.892.600		1 tahun	310.081.860	APBD KOTA		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan Izin kendaraan	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan operasional	BPMPPT KOTA JAMBI	6 dan 11 Unit Kendaraan	15.000.000		6 dan 11 Unit Kendaraan	16.500.000	APBD KOTA		
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pengelolaan administrasi keuangan kantor dengan baik	Terlaksananya/tertibnya administrasi keuangan kantor	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	305.085.225		1 tahun	335.593.748	APBD KOTA		
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat, bahan, dan tenaga kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor dalam gedung dan luar gedung kantor	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	127.250.000		1 tahun	139.975.000	APBD KOTA		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	Tersedia ATK untuk kelancaran kerja	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	68.578.000		1 tahun	75.435.800	APBD KOTA		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	53.000.000		1 tahun	58.300.000	APBD KOTA		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk penerangan dan kelancaran kerja kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk penerangan dan kelancaran kerja kantor	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	16.500.000		1 tahun	18.150.000	APBD KOTA		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk Pegawai BPMPPT Kota Jambi	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pegawai	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	17.930.000		1 tahun	19.723.000	APBD KOTA		
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan dan minum tamu dan rapat untuk meningkatkan pelayanan kantor	Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat untuk meningkatkan pelayanan kantor	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	39.800.000		1 tahun	43.780.000	APBD KOTA		
11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Peningkatan SDM Pegawai BPMPPT Kota Jambi	Terlaksananya Perjalanan Dinas dan Rapat keluar daerah/study banding, pameran dan bimtek	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	320.000.000		1 tahun	352.000.000	APBD KOTA		
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan front office	Terciptanya keamanan Kantor dan kenyamanan kualitas pelayanan publik	Terjaganya keamanan kantor dan meningkatnya kualitas pelayanan publik	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	170.400.000		1 tahun	187.440.000	APBD KOTA		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				821.832.000			904.015.200				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kelancaran dalam Pelayanan Publik	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional lapangan untuk kelancaran pelayanan publik	BPMPPT KOTA JAMBI	1 Mobil & 2 Motor	205.000.000		1 mobil 1, mtr 2	225.500.000	APBD KOTA		
2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan Prasarana gedung Kantor BPMPPT Kota Jambi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor BPMPPT Kota Jambi	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	113.275.000		1 tahun	124.602.500	APBD KOTA		
3	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Kantor BPMPPT Kota Jambi untuk kelancaran kerja	Tersedianya meja dan kursi kerja pegawai dan ruang rapat	BPMPPT KOTA JAMBI	7 Jenis	100.000.000		1 tahun	110.000.000	APBD KOTA		
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor yang layak pakai	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	36.000.000		1 tahun	39.600.000	APBD KOTA		
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang layak	Terpeliharanya gedung kantor	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	68.147.000		1 tahun	74.961.700	APBD KOTA		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017		SUMBER DANA		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KNERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang laik jalan (roda empat dan roda dua)	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai	BPMPPPT KOTA JAMBI	1 tahun	167.860.000		1 tahun	184.646.000	APBD KOTA		
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang laik pakai	Tersedianya alat-alat kantor yang layak pakai	BPMPPPT KOTA JAMBI	1 tahun	30.250.000		1 tahun	33.275.000	APBD KOTA		
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peraltan gedung kantor	BPMPPPT KOTA JAMBI	1 tahun	36.300.000		1 tahun	39.930.000	APBD KOTA		
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terciptanya Keindahan dan kenyamanan gedung kantor	Terjaganya keindahan dan kenyamanan gedung kantor	BPMPPPT KOTA JAMBI	100%	65.000.000		1 tahun	71.500.000	APBD KOTA		
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					115.000.000			126.500.000			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian pekerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai (PNS, Petugas Keamanan, FO, Pramubakti, CS),Petugas lap, petugas Administrasi dan sopir	Tersedianya pakaian pekerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai (PNS, Petugas Keamanan, FO, Pramubakti, CS),Petugas lap, petugas Administrasi dan sopir	BPMPPPT KOTA JAMBI	140 stel dan 12	115.000.000		1 Tahun	126.500.000	APBD KOTA		
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					67.200.000			73.920.000			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Pegawai BPMPPPT Kota Jambi	Tersedianya pegawai yang terlatih ,terampil dan berwawasan.	BPMPPPT KOTA JAMBI	1 Tahun	67.200.000		1 th	73.920.000	APBD KOTA		
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					9.500.000			10.450.000			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Laporan Kinerja BPMPPPT Kota Jambi	Tersedianya informasi kinerja LPPD dan Lakip	BPMPPPT KOTA JAMBI	2 dokumen	9.500.000		2 Dokumen	10.450.000	APBD KOTA		
06	Program perencanaan SKPD					9.500.000			10.450.000			
1	Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Rencana Kerja BPMPPPT Kota Jambi	Tersusunnya rencana kerja SKPD, IKU, TAPKIN	BPMPPPT KOTA JAMBI	1 Tahun	9.500.000		3 dokumen	10.450.000	APBD KOTA		
2	Penyusunan Renstra SKPD		Tersusunnya rencana Strategis SKPD	BPMPPPT KOTA JAMBI	-	0			-			
07	Program pengembangan Data / Informasi					100.000.000			110.000.000			
1	Pengembangan data/informasi	Investor Dan Para Pelaku Usaha serta Masyarakat	Tercapainya informasi pelayanan perizinan melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik (menuju pelayanan secara on line)	BPMPPPT KOTA JAMBI	100%	100.000.000		1 tahun	110.000.000	APBD KOTA		
08	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik					927.563.000			1.020.319.300			
1	Verifikasi Penerbitan, Identifikasi, Dokumen Perizinan	Tersedianya blanko perizinan bagi pemohon serta meningkatnya koordinasi dalam rangka identifikasi dan verifikasi	Tersedianya Blanko Perizinan bagi pemohon	BPMPPPT KOTA JAMBI	20 ribu pemohon	388.875.000		1 tahun	427.762.500	APBD KOTA		
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Para Pelaku Usaha Di Kota Jambi	Tercapainya pelayanan Perizinan yang Prima	BPMPPPT KOTA JAMBI	1 tahun	221.325.000		1 tahun	243.457.500	APBD KOTA		
3	Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi, buku IKM dan penanganan pengaduan masyarakat serta pembinaan perizinan di 11 kecamatan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Perizinan dan tersusunnya SKM serta Terfasilitasi Pengaduan Masyarakat serta terlaksananya pembinaan pelaksanaan perizinan di 8 Kecamatan	BPMPPPT KOTA JAMBI	1,000 pengaduan pengaduan	242.822.000		1 tahun	267.104.200	APBD KOTA		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017		SUMBER DANA		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KNERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengelolaan data dan Penataan Arsip Perizinan	Buku Database Perizinan	Tersedianya Informasi Jumlah Perizinan yang telah dikeluarkan serta tertata dan terpeliharanya arsip	BPMPPT KOTA JAMBI	1 tahun	74.541.000		1 tahun	81.995.100	APBD KOTA		
09	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					461.439.000			507.582.900			
1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang kurangnya satu bidang setiap tahun dan tepromosinya potensi investasi dan beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	Terlaksananya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang kurangnya satu bidang setiap tahun dan tepromosinya potensi investasi dan beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	Kota Jambi & Luar Daerah	1 bidang & 3 keg	286.539.000	Luar Daerah yang potensial utk promosi	1 bidang & 2 Keg	315.192.900	APBD KOTA		
2	Sosialisasi Penanaman Modal	SKPD Terkait dan pelaku usaha di Kota Jambi	Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan penanaman modal kota jambi	BPMPPT KOTA JAMBI	2 kegiatan	69.019.000		1 tahun	75.920.900	APBD KOTA		
3	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	PMA & PMDN	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dikota Jambi	BPMPPT KOTA JAMBI	50%	81.804.000	RKPPMD dilaksanakan sebelum RKPPMD Prop	1 kegiatan	89.984.400	APBD KOTA		
4	Pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik	Investor/Pengusaha	Terwujudnya sistem pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang berbasis IT	BPMPPT KOTA JAMBI	50%	24.077.000	dengan asumsi telah mendapatkan pelimpahan kewenangan	1 tahun	26.484.700	APBD KOTA		
TOTAL PAGU						3.941.930.425			4.336.123.468			

An. Ptl. KEPALA BPMPPT KOTA JAMBI



PENATA TK I

NIP. 19661201 199303 1 006